



RENJA

RENCANA KERJA



20
26



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,
Semoga Allah SWT meridhoi kita sekalian, amin.

Puji dan syukur Kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 telah dapat tersusun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 dan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan dokumen ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Rencana Kerja (Renja) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.

Sarilamak, Agustus 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kabupaten Lima Puluh Kota,

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu	12
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	31
3.3 Program dan Kegiatan	34
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	40
BAB V Penutup.....	64
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	64
5.2 Rencana Tindak Lanjut	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kalender Penyusunan Renja Satpol PP Tahun 2026	3
Tabel 2. 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP s/d Tahun 2024.....	13
Tabel 2. 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP	22
Tabel T-C. 2. 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	27
Tabel 2. 4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	29
Tabel 3. 1	Permasalahan Satpol PP	31
Tabel 3. 2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Pada Tahun 2025-2029	33
Tabel 3. 3	Program dan Kegiatan OPD	34
Tabel 3. 4	Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pemerintah	35
Tabel 3. 5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol pp Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	37
Tabel 4. 1	Program dan kegiatan Satpol PP.....	41
Tabel 4. 2	Tabel Rencana Kebutuhan Pendanaan	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk Menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, Lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam melakukan penyusunan Renja PD Tahun 2026, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan. Dengan berpedoman pada pasal 128 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja Satpol PP sebagai berikut :

- I. Persiapan Penyusunan;
- II. Penyusunan Rancangan Awal;
- III. Penyusunan Rancangan;
- IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- V. Perumusan Rancangan Akhir;
- VI. Penetapan Renja PD.

I. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penyusunan keputusan Bupati Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 tentang Pembantuan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam formasi jabatan *ex-officio*.
2. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD RI.

II. Penyusunan Rancangan Awal Renja

Pada awal bulan Desember 2024 mulai dilakukan penyusunan Rancangan Awal Renja Satpol PP oleh tim penyusun. Penyusunan berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Satpol PP tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Satpol PP mencakup analisis gambaran

pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Adapun jadwal penyusunan Renja disajikan pada tabel 1.1 berikut ini :

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2024								2025																																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																												
C	Penyusunan Rancangan Renja 2026																																												
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pikir serta hasil Musrenbang																																												
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																												
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal																																												

III. Penyusunan Rancangan Renja

Penyusunan Rancangan Renja Satpol PP berpedoman pada RPJMD tahun 2025 - 2029 dan Renstra Satpol PP tahun 2025 - 2029. Renja akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD disempurnakan berdasarkan hasil kesepakatan Forum Konsultasi Publik. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan tersebut akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja.

IV. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD

Rancangan Awal Renja yang telah disempurnakan akan menjadi Rancangan Renja dan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang selanjutnya disempurnakan berdasarkan masukan dan berita acara forum tersebut. Rancangan Awal Renja yang telah disempurnakan akan diverifikasi oleh Bapelitbang untuk melihat kesesuaian dan keselarasan antara Rancangan Renja dengan Rancangan Akhir RKPD dan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan ini menjadi Rancangan RKPD.

Dalam pembahasan Rancangan RKPD harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang secara tidak langsung juga akan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional.

Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dalam perencanaan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025 di Aula Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan 20 Perangkat Daerah yaitu Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Kecamatan se-Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Bagian Perekonomian dan SDA, dan Bappelitbangda.

V. Perumusan Rancangan Akhir

Rancangan Akhir RKPD akan dibahas bersama dengan seluruh kepala perangkat daerah guna memastikan bahwa program dan kegiatan PD telah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD. Rancangan Akhir RKPD yang telah dibahas akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

Perumusan terhadap Rancangan Akhir Renja dilakukan berdasarkan Perkada RKPD yang telah ditetapkan. Setelah Rancangan Akhir Renja disempurnakan dan diverifikasi oleh Bappelitbangda maka Renja tersebut ditetapkan dengan Perkada.

VI. Penetapan Renja PD

Penetapan Renja PD mempedomani Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 18).

Selanjutnya Renja Satpol PP digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja Satpol PP juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju. Penyusunan Renja mengacu kepada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 - 2029, Renstra Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta Kementerian/Lembaga. Dengan kata lain penyusunan Renja Satpol PP tidak terlepas dari RPJPD Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi Sumatera Barat, RPJM Provinsi Sumatera Barat, RPJP Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJM Kabupaten Lima Puluh Kota, Renstra K/L, Renstra PD Provinsi Sumatera Barat, Renstra Satpol PP, RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat, RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, Renja K/L dan Renja PD Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun mendatang, maka kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya harus mendukung efektifitas pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan

- Polisi Pamong Praja;
6. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pengarusutamaan Gender;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 108);
 18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 18).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Satpol PP secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas, Renja Satpol PP ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Satpol PP dalam merencanakan program dan kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang di Satpol PP.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP pada tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Satpol PP Tahun 2026 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Ranwal Renja Satpol PP, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Satpol PP, analisis kinerja pelayanan Satpol PP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan sebagainya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, tujuan dan sasaran Renja Satpol PP dan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renja Satpol PP Tahun 2026 sebagai pedoman kerja termasuk harapan Kepala Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1 Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satpol PP Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Satpol PP tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP tahun 2024 dan realisasi Renstra Satpol PP mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Satpol PP dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Berdasarkan 3 kondisi diatas, pada bab ini nantinya akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satpol PP. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Pencapaian Renstra Satpol PP Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satpol PP) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Satpol PP tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Satpol PP s/d tahun 2025	
					Target Renja Satpol PP tahun 2024	Realisasi Renja Satpol PP tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satpol PP) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Satpol PP tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Satpol PP s/d tahun 2025	
					Target Renja Satpol PP tahun 2024	Realisasi Renja Satpol PP tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100%	20%	20%	100%	100%	100 %	100 %
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satpol PP) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Satpol PP tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Satpol PP s/d tahun 2025	
					Target Renja Satpol PP tahun 2024	Realisasi Renja Satpol PP tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	20%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan administrasi umum	100%	100%	20%	20%	100%	20%	20%	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satpol PP) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Satpol PP tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Satpol PP s/d tahun 2025	
					Target Renja Satpol PP tahun 2024	Realisasi Renja Satpol PP tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	-	-	-	-	100%	100%	100%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20%	20%	20%	100%	20%	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satpol PP) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Satpol PP tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Satpol PP s/d tahun 2025	
					Target Renja Satpol PP tahun 2024	Realisasi Renja Satpol PP tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20%	20%	100%	100%	100%	100%
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN		100 %	100%	77%	77%	100%	77%	77%	77%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satpol PP) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Satpol PP tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Satpol PP s/d tahun 2025	
					Target Renja Satpol PP tahun 2024	Realisasi Renja Satpol PP tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	DAN KETERTIBAN UMUM									
02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	100%	100%	36%	36%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Satpol PP) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja Satpol PP tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Satpol PP s/d tahun 2025	
					Target Renja Satpol PP tahun 2024	Realisasi Renja Satpol PP tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4
02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Persentase Penurunan Jumlah Persentase penurunan pelanggaran perda		100%	36%	36%	100%	100%	100%	100%
02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda		100%	5%	5%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, evaluasi terhadap pencapaian terget dan realisasi renja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- I. Program atau kegiatan yang **tidak** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Satpol PP selama tahun 2024, tidak terdapat di Satpol PP
- II. Program dan kegiatan yang **telah** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaian sebesar 100%, realisasi pencapaian adalah 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%. Seluruh kegiatan program ini telah mencapai target capaian, yaitu :
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, target pencapaian kegiatan ini sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, direncanakan target pencapaiannya sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
 - c. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah, direncanakan target pencapaian sebesar 100%, realisasi pencapaiannya adalah sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
 - d. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan target pencapaian sebesar 100%, realisasi pencapaiannya sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya 100%.
 - e. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, direncanakan target pencapaian sebesar 100%, dengan realisasi pencapaian sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
 2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, direncanakan target pencapaian sebesar 100%, realisasi pencapaian adalah 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%. Seluruh kegiatan program ini telah mencapai target capaian, yaitu :
 - a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaian sebesar 100%, dengan realisasi pencapaian sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
 - b. Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, direncanakan target pencapaian sebesar 100%, dengan realisasi pencapaian sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.
 - c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas PPNS Kabupaten/Kota, direncanakan target pencapaian

sebesar 100%, dengan realisasi pencapaian sebesar 100%, sehingga tingkat realisasinya sebesar 100%.

- III. Program dan kegiatan yang **melebihi** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di Satpol PP selama tahun anggaran 2024, tidak terdapat di Satpol PP.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerjanya diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya untuk program/kegiatan dan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 memiliki tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah SATPOL PP Kabupaten Lima Puluh Kota dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan : Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial.

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satpol PP

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat

Standar Pelayanan Minimal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2018 dan dijabarkan dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, dimana pencapaian target SPM 100% menjadi kinerja kepala daerah. Secara rinci akan dijelaskan tentang layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP dengan jenis pelayanan dasar adalah *Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum* dengan Indikator Pencapaian yaitu *Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada*.

Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota seperti pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SATPOL PP

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKD	IKU KD	IKU Kepala OPD	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2026	Tahun 2027	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	13	14	15	16
1	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	√					100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	• Realisasi tahun 2025 tidak tersedia
2	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan		√	√	√	√	82%	87%	90%	100%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	• Realisasi tahun 2025 tidak tersedia
3	Persentase penyelenggaraan Trantibumlinmas					√	100%	100%	100%	100%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	• Realisasi tahun 2025 tidak tersedia
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sakip (SAKIP)				√		77,75%	78%	78,50%	78,51%	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	Tidak Tersedia	• Realisasi tahun 2025 tidak tersedia

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bab ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan satpol PP dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan satpol PP terhadap *stakeholders*.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi satpol PP
3. Dampak dari permasalahan dan hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterlibatan umum ketenteraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
5. Formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Kinerja Satpol PP pada tahun 2024 sudah cukup optimal. Hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa Upaya antara lain :

1. Aplikasi SIPD
Penerapan aplikasi SIPD untuk penyusunan perencanaan merupakan salah satu bentuk upaya Satpol PP dalam peningkatan pelayanan pada *stakeholders*. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini maka penyusunan perencanaan yang berkualitas, transparan dan tepat waktu dapat terlaksana.
2. Memanfaatkan media sosial untuk kelancaran komunikasi dengan OPD dan instansi vertical penegak hukum.
3. Pelaksanaan rapat koordinasi lingkup masing-masing bidang di Satuan Polisi Pamong Praja. Rapat koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat. Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas perencanaan dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat dapat ditingkatkan.

Renja yang disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2026 tidak terlepas dari analisis strategis terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan

sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran Informasi razia yang masih ada; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Tingkat heterogen masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kemudian dapat juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.
3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat optimal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif.
4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Kabupaten Lima Puluh Kota
Misi Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan RPJMD periode tahun 2025- 2029 adalah masuk pada Misi Ke-dua yakni "*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.*"
Satpol PP termaktub dalam arah kebijakan Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Penguatan Penegakan Hukum yang Berintegritas, Pemberdayaan Masyarakat dalam Demokrasi dan Hukum, Kolaborasi Strategis Lintas Sektor, serta Keamanan Berbasis Hak Asasi dan Keadilan Sosial.
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah wilayah Perlintasan antar Kota dan Antar Provinsi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Kabupaten Lima Puluh Kota terutama wilayah perbatasan sangat terbuka lebar.
5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal Untuk pelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka harus ditingkatkan pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bagus. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah aparatur yang berkualitas. Namun

pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, kuantitas aparatur dan program/kegiatan pendidikan serta pelatihan aparatur masih terbatas. Kemudian belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hambatan dan persoalan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tahun 2025-2029. Satpol PP merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke-2 (dua) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuannya adalah mengurangi kasus pelanggaran Perda dan Perkada, penyakit masyarakat serta meningkatkan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Merunut pada permasalahan yang ada, untuk meningkatkan kinerja Satpol PP di masa mendatang, tantangannya yang dihadapi Satpol PP dalam beberapa tahun mendatang adalah :

1. Semakin strategisnya peran Satpol PP dalam tuntutan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di pemerintah tingkat Kabupaten/Kota.
2. Perubahan kebijakan pemerintah untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang elegan, humanis dan berintegritas.
3. Meningkatkan tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses penegakan Perda dan Perkada.

Sedangkan peluang bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistim layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi pelayanan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
3. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal.

Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah ujung tombak dalam ketenteraman dan ketertiban umum sehingga untuk kedepan pengembangan terus dilakukan dengan sumber daya yang ada serta mampu melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan perundangan yang berlaku, kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu – isu strategis yang tengah dihadapi oleh Satpol PP saat ini sebagai berikut :

1. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Kualitas dan kapasitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam

- pengelolaan data dan informasi;
4. Masih belum maksimalnya prosedur standar operasional ketenteraman dan ketertiban umum untuk menganalisa resiko di lapangan;

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD

Dalam menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja, maka diperlukan review terhadap evaluasi RKPD tahun 2025 agar terwujudnya keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat terwujud. Berdasarkan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 bahwa Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi kedua, yaitu:

Tabel T-C. 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20%	5.851.653.722	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	20%	6.209.845.447	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	20%	1.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	20%	15.000.000	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	20%	5.730.589.864	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	20%	5.918.353.247	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD</i>	20%	490.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD</i>	20%	5.000.000	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase tertib Administrasi umum Perangkat Daerah</i>	20%	9.511.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	<i>Persentase tertib Administrasi umum Perangkat Daerah</i>	20%	135.972.200	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20%	31.476.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20%	12.100.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	20%	78.586.858	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	20%	123.420.000	
8	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	77 %	1.900.945.000	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	87 %	1.360.641.064	
9	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase kasus pelanggaran perda	100 %	1.842.920.000	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase kasus pelanggaran perda	100 %	1.289.746.564	
10	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 %	40.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	100 %	64.166.600	
11	Pembinaan PPNS Kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	prosentase penurunan pelanggaran perda	100 %	18.025.000	PPNS Kabupaten/kota	Kab. Lima Puluh Kota	prosentase penurunan pelanggaran perda	100 %	236.115.844	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Satpol PP tahun 2026 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Satpol PP memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang, baik mulai dari Musrenbang Nagari, Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum Perangkat Daerah, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sudah diakomodir dalam Renja Satpol PP. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 tidak ada penjelasannya.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan instansi pusat yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan rencana strategisnya terdapat rencana pembangunan yaitu program bina administrasi kewilayahan pada kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Sehubungan hal di atas dan menindaklanjutinya, Bupati Lima Puluh Kota sebagai pelaksana pemerintahan di daerah harus melaksanakan urusan pemerintahan wajib dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu : ketenteraman, ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sehingga salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota kedepan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

Tabel 3. 1
Permasalahan Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota berdasarkan
sasaran renstra Ditjen Bina Adwil Kemendagri dan Satpol PP
Provinsi Sumatera Barat beserta faktor penghambat dan
pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Ditjen Bina Adwil Kemendagri	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi Sumbar	Permasalahan Trantibumlin mas Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota	Faktor Penghambat	Faktor pendorong
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Sumatera Barat	Belum optimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan perda di Kab. Lima Puluh Kota	1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Satpol PP 2. OPD belum memahami seutuhnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi di Kabupaten Lima Puluh Kota 3. Terbatasnya anggaran , sarana dan prasarana yang tersedia di Satpol PP	Kegiatan sosialisasi/bimtek dan peningkatan kapasitas untuk aparat Satpol PP akan membantu meningkatkan kualitas dan pemahaman tentang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta trantibumlinmas

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maka Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota merumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Tercapainya dan terarahnya suatu rancangan akhir rencana kerja (Renja)SKPD Tahun 2026 mendatang.
2. Agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan yaitu untuk meningkatkan ketertiban umum ketentraman masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi, monitoring, pembinaan dan evaluasi dengan SKPD terkait agar terwujudnya peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dan warga Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah, keputusan Kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya.
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang tujuan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan warga kota dalam menegakan Peraturan daerah, Keputusan Kepala daerah dan Produk Hukum daerah lainnya dengan menghormati hak asasi manusia yang berlandaskan keadilan.

Dalam rangka untuk menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditentukan Sasaran yang akan dicapai, agar lebih terukur, terdiri dari :

1. Melakukan upaya penyadaran warga masyarakat tentang produk hukum (Perda) dan/atau keputusan kepala daerah dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan Perda di 13 Kecamatan
2. Penertiban Homestay, cafe music dan salon
3. Penertiban IMB/SITU dan bangunan liar
4. Melaksanakan Peradilan Cepat
5. Penertiban Pekerja Sex Komersial
6. Penertiban Rental VCD/DVD porno
7. Penertiban Warung Kelambu
8. Penertiban Minuman keras
9. Pembinaan Pekerja Sex Komersial
10. Meningkatkan sarana dan Prasarana Kantor
11. Pembenahan sistem dan management kantor
12. Penertiban Papan Reklame
13. Peningkatan profesionalisme dan kinerja Personil

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP Pada Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perbup Kab. Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.	Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial		Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	$\frac{\text{Jumlah Kasus pelanggaran perda yang terselesaikan}}{\text{jumlah penanganan kasus pelanggaran perda}} \times 100$
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	77,50	77,75	78,00	78,25	78,80	79,00	Nilai AKIP Satpol PP hasil evaluasi dari Inspektorat

Sumber : Satpol PP Kab. 50 Kota

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang direncanakan tahun 2026, didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor – faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu – isu strategis dan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota serta pertimbangan dokumen perencanaan lainnya serta masukan dan saran dari pemangku kepentingan.

**Tabel 3. 3 Program dan Kegiatan OPD
Program dan Kegiatan yang ada pada setiap OPD**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Administrasi keuangan perangkat daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
		Administrasi umum perangkat daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan bahan logistik kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Fasilitasi kunjungan tamu 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan peralatan mesin lainnya

Tabel 3. 4 Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pemerintahan Program dan Kegiatan Lingkup Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum 3. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPnsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 5. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan 6. Penindakan atas gangguan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa 7. Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 8. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum
		Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	1. Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 2. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 3. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah 2. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

Pada tahun anggaran 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 2 program dan 9 Kegiatan, 27 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran **Rp. 7.570.486.511,-**

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satpol PP
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah: SATPOL PP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SATPOL PP					7.570.486.511				19.272.472.120
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.570.486.511				19.272.472.120
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.570.486.511				19.272.472.120
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	<i>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota	20 %	6.209.845.447	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	11.481.762.401
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja</i>	Kab. Lima Puluh Kota	20%	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana		-	57.264.747

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>perangkat daerah</i>				Alokasi Umum			
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</i>	Kab. Lima Puluh Kota	20%	5.918.353.247	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6.948.567.987
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD</i>	Kab. Lima Puluh Kota	20%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	1.825.000.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tertib Administrasi umum Perangkat Daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota	20%	135.972.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	499.000.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pelaksanaan Administrasi Umum</i>	Kab. Lima Puluh Kota	20%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	1.257.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	Kab. Lima Puluh Kota	20%	12.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	546.312.153

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Kab. Lima Puluh Kota	20%	123.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	348.617.514
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan kasus pelanggaran PERDA	Kab. Lima Puluh Kota	87 %	1.360.641.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	7.790.709.719,
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus pelanggaran perda	Kab. Lima Puluh Kota	100 %	1.289.746.564	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU, SPM, PUG, Misi 4	-	6.461.537.656
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda	Kab. Lima Puluh Kota	100 %	64.166.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	IKU, SPM, Misi 4	-	996.841.000
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	prosentase penurunan pelanggaran perda	Kab. Lima Puluh Kota	100 %	6.727.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM	-	332.331.063
JUMLAH					7.570.486.511				19.272.472.120

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun anggaran 2026 Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota, merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 2 program dan 9 Kegiatan, 27 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran **Rp. 7.570.486.511,-**

Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Renja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota. Satpol PP tahun 2026 terkait menjaga ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan melakukan peningkatan Keamanan agar situasi tetap aman dan kondusif dengan meningkatkan patroli rutin, Razia wilayah yang dicurigai berpotensi meningkatkan situasi kurang kondusif, serta mengadakan peningkatan kapasitas Satlinmas yang akan terjun langsung dalam menjaga keamanan di tingkat Jorong, Nagari, Kecamatan dan Tingkat Kabupaten .

Renja Satpol PP menguraikan program bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang. Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Satpol PP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1																
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						7.570.486.511,00							19.272.472.120,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.570.486.511,00							19.272.472.120,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7.570.486.511,00							19.272.472.120,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.209.845.447,00						-	11.481.762.401,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-				20 %	15.000.000,00				Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-	57.264.747,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-	57.264.747,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.918.353.247,00			-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-	-	6.948.567.987,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				76 Orang/bulan	5.912.093.247,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-		6.913.587.862,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	6.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-		34.980.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	1.825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				136 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	135.972.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	499.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.804.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	33.108.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		47.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	23.999.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	10.558.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-		13.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	62.301.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-		403.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-	-	1.257.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		57.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.100.000,00			-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-	-	546.312.153,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-		8.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	11.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				36 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-		462.612.153,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.420.000,00			-	Mewujudk a n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualita s	-	-	348.617.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				9 Unit	120.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		328.817.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				6 Unit	2.970.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		19.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	1.360.641.064,00						-	7.790.709.719,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA</i>	-			100 %	1.289.746.564,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasayarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	6.461.537.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>				36 Dokumen	36.490.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasayarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		183.645.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				30 Dokumen	21.835.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		612.152.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	32.491.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkat k an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasark a n falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanju t an	-		1.650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														
			<i>Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja</i>				136 Orang	1.086.301.064,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkat k an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	-		1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				22 laporan	49.991.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasayarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				22 Laporan	39.995.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani</i>				30 Laporan	12.655.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkat k an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasar k an falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanj u t an	-		115.740.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>				10 Unit	9.987.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkat k an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasar k an falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanj u t an	-		1.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA</i>	-			100 %	64.166.600,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasayakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	996.841.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Pengaturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengaturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				24 Laporan	10.421.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasayakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				24 Laporan	43.745.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasark an falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		367.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				20 Laporan	9.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		279.841.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penurunan Petanggaran PERDA</i>	-			100 %	6.727.900,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		332.331.063,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama. Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah</i>				7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasayakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		297.331.063,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda</i>				2 Laporan	6.727.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkat k an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasark a n falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanju t an	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
J U M L A H								7.570.486.511,00							19.272.472.120,00	

**Tabel 4. 2 Tabel Rencana Kebutuhan Pendanaan
Tabel Rencana Kebutuhan Pendanaan berdasarkan Urusan, Jumlah Program Dan Kegiatan Tahun 2026**

NO	Bidang Urusan	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2026		Tahun 2027	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					Rp. 19.582.312.344		
1	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	Rp. 6.209.845.447	Rp. 11.481.762.401	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Rp. 15.000.000	11.481.762.401	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.918.353.247			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 135.972.200			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 0			

NO	Bidang Urusan	Tahun 2026		Tahun 2027	Tahun 2026		Tahun 2027	Ket
		Program			Kegiatan			
		Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
					Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Rp. 12.100.000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 123.420.000		
	2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Rp. 1.360.641.064	Rp. 7.790.709.719	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.289.746.564	Rp. 7.790.709.719	
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 64.166.600		
					PPNS Kabupaten/Kota	Rp. 6.727.900,		

BAB V PENUTUP

Dokumen Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang berpedoman kepada Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tidak mengesampingkan data/ masukan/ rekomendasi dari Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota.

Renja Satpol PP disusun disesuaikan dengan kondisi kebutuhan anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2026. Kebutuhan pendanaan yang telah dikompilasikan dalam Dokumen Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 disusun dengan memperhatikan antara lain :

1. Rekomendasi/usulan dari unsur masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Kegiatan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026 wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam mengimplementasikan Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja OPD tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun program kerja OPD, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Tahun Anggaran (TA) 2026;
2. Pada akhir tahun anggaran 2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Renja Satpol PP Tahun 2026 yang telah ditetapkan akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Satpol PP dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam DPA. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2026, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Renja Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.

Ditetapkan di sarilamak
Pada Tanggal Agustus 2026
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Drs. DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198809 1 002